

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Devas, & dkk. (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press.

Dr.Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Jakarta, Zifatama Jawa.

J Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

In Hutuey ,Alwi , Hasniati. (2021) Diskresi Birokrasi Garis depan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Thesis : Universitas Hasanuddin.

Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.

Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: RMBooks.

Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy, 30th Anniversary Edition: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Amerika Serikat, Russell Sage Foundation.

Pioh, N. (2014). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa. Disertasi*. Bandung, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran.

Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Simorangkir, J., & dkk. (2008). *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Utrecht, E. (1988). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas.

JURNAL :

Burhan, E. e. a. (2020). ISBN: 978-623- 92964-9-0,. *Pedoman tatalaksana COVID-19 edisi 3, Jakarta*.(P. 3-7.).

Firdaus, F. R., & Erliyana, A. (2020). PALAR: Pakuan Law Review 6.02. *Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020*.

Murniati, U., Marina, A., & Rusmawati, Z. (2021). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. *SUSTAINABLE*, 1(1), 1-21.

Munaf, Y. (2018, Riau). *Jurnal Kajian Pemerintahan. Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris), Volume IV Nomor 1*.

Sulumin, H. H. (2015, Januari). *Jurnal Katalogis. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala, Volume 3*.

Wajhannuri, M., & Ubaidullah, M. A. (2018). Diskresi Dan Implementasi Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus di Gampong Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(3).

INTERNET :

Berty, T. S. (2020, March 2). *Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Jadi Sorotan Dunia*. Liputan6.com. Retrieved August 28, 2022, from <https://www.liputan6.com/global/read/4191815/kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia> (Diakses pada tanggal 29 Juli 2022)

Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. (2021, March 31). DJPb. Retrieved August 28, 2022, from <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> (diakses tanggal 11 agustus 2022)

Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati. (2022, June 22). Alodokter. Retrieved August 28, 2022, from <https://www.alodokter.com/virus-corona> (diakses pada tanggal 15 agustus 2022)

WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global Halaman all. (2020, March 12). Kompas.com. Retrieved August 28, 2022, from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> (Diakses pada 3 Agustus 2022)

PERATURAN :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan*, 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015, *Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri dalam Negeri Republik Indonesia*.